AKADEMIK E-ISSN 2774-888X
Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis
Vol. 6, No. 3, September 2026

Analisis Kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk dalam Perspektif Etika Jawa Franz Magnis-Suseno

Primus Arvel Priandika
Universitas Brawijaya, Indonesia
primusarvel31@gmail.com

Submitted: 23rd June 2026 | **Edited**: 24th July 2026 | **Issued**: 01st September 2026

Cited on: Priandika, P. A. (2026). Analisis Kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk dalam Perspektif Etika Jawa Franz Magnis-Suseno. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 6*(3), 1475-1487.

ABSTRACT

Corporate bankruptcy is commonly examined from financial and legal perspectives, while its ethical dimension remains underexplored, particularly within Indonesia's socio-cultural context. This study aims to analyze the bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) by examining how ethical failure contributed to corporate collapse through the perspective of Franz Magnis-Suseno's Javanese Ethics. A qualitative case study approach was employed using secondary data collected from academic literature, court decisions, official reports, and credible media publications. Data were analyzed through document analysis following the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, supported by source triangulation to enhance credibility. The findings indicate that the bankruptcy of Sritex was closely associated with systematic ethical failure reflected in financial statement manipulation, abuse of authority, collusion, and fraudulent practices. These actions contradicted the Javanese principles of harmony (kerukunan) and respect (hormat), which were distorted to preserve a false image of organizational stability and justify unethical decision-making. This study demonstrates that Javanese Ethics provides a relevant analytical perspective for explaining corporate fraud beyond conventional governance and financial approaches, while highlighting the importance of ethical leadership in sustaining organizational integrity.

Keywords : Corporate Fraud, Javanese Ethics, Corporate Governance, Bankruptcy, Sritex

PENDAHULUAN

Kebangkrutan korporasi tidak hanya merefleksikan kegagalan finansial, tetapi juga dapat menunjukkan lemahnya tata kelola perusahaan, pengendalian internal, dan integritas etika dalam proses pengambilan keputusan. Berbagai kasus menunjukkan bahwa praktik fraud seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang, dan kolusi sering kali menjadi faktor yang mempercepat keruntuhan perusahaan (Capraş & Achim, 2024; Devi, 2024). Di Indonesia, Survei Fraud Indonesia menempatkan korupsi sebagai bentuk fraud yang paling dominan dibandingkan penyalahgunaan aset maupun kecurangan laporan keuangan (ACFE Indonesia Chapter, 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan fraud tidak hanya berkaitan dengan kelemahan sistem

pengendalian, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, budaya organisasi, dan kualitas kepemimpinan yang membentuk perilaku para pengambil keputusan.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya menjelaskan bahwa praktik fraud dipengaruhi oleh tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, dan kolusi sebagaimana dijelaskan dalam Fraud Hexagon Theory (Christian et al., 2024; Tamaela et al., 2025; Vousinas, 2019). Penelitian lain menekankan pentingnya corporate governance sebagai mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam mencegah penyimpangan organisasi (Devi, 2024; Moridu, 2023). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berorientasi pada aspek finansial, hukum, maupun tata kelola perusahaan, sedangkan dimensi etika yang melatarbelakangi munculnya perilaku fraud, khususnya dalam konteks nilai budaya lokal Indonesia, masih memperoleh perhatian yang terbatas. Padahal, keputusan bisnis tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme formal organisasi, tetapi juga oleh nilai sosial yang berkembang dalam lingkungan tempat organisasi beroperasi.

Kesenjangan tersebut menjadi relevan untuk dikaji melalui kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Selain menghadapi tekanan keuangan yang berujung pada kepailitan, perusahaan ini juga dihadapkan pada dugaan manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan fasilitas kredit, serta praktik kolusi yang melibatkan berbagai pihak (Ristiyanti, 2025). Kompleksitas kasus tersebut menunjukkan bahwa penyebab kebangkrutan tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui indikator ekonomi ataupun kegagalan tata kelola, melainkan perlu dipahami sebagai konsekuensi dari proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh dimensi moral dan etika. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus Sritex memerlukan perspektif yang mampu menjelaskan hubungan antara perilaku organisasi, budaya, dan integritas kepemimpinan secara lebih komprehensif.

Penelitian ini menggunakan Perspektif Etika Jawa Franz Magnis-Suseno sebagai landasan utama untuk menelaah bagaimana prinsip kerukunan dan hormat dipraktikkan ataupun mengalami penyimpangan dalam tata kelola perusahaan. Perspektif tersebut dipadukan dengan Fraud Hexagon Theory sebagai kerangka untuk mengidentifikasi pola fraud, serta prinsip corporate governance sebagai acuan dalam menilai kualitas pengelolaan organisasi. Integrasi ketiga perspektif tersebut memungkinkan analisis yang tidak hanya menjelaskan bagaimana fraud terjadi, tetapi juga mengungkap mengapa

praktik tersebut dapat diterima, dirasionalisasi, dan dipertahankan dalam suatu organisasi

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk melalui perspektif Etika Jawa Franz Magnis-Suseno dengan mengaitkannya pada praktik fraud dan kegagalan corporate governance. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas penggunaan Etika Jawa sebagai perspektif analitis dalam kajian akuntansi dan tata kelola perusahaan, sekaligus menawarkan pemahaman bahwa kebangkrutan korporasi tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, tetapi juga oleh kemerosotan integritas moral yang berkembang secara sistematis dalam organisasi.

LANDASAN TEORI

Etika Jawa Franz Magnis-Suseno dalam Konteks Organisasi

Etika Jawa memandang kehidupan sosial sebagai upaya menjaga keseimbangan hubungan antarmanusia melalui dua prinsip utama, yaitu kerukunan dan hormat. Prinsip kerukunan menekankan pentingnya menciptakan hubungan sosial yang harmonis dengan menghindari konflik terbuka, sedangkan prinsip hormat mengatur perilaku individu dalam relasi hierarkis melalui kesadaran akan tanggung jawab moral, rasa malu (isin), rasa takut (wedi), dan sikap sungkan terhadap pihak lain (Roring & Tondok, 2025). Dalam konteks organisasi modern, nilai-nilai tersebut dapat menjadi fondasi terbentuknya budaya etis yang mendorong kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas organisasi. Namun demikian, apabila dipahami secara keliru, nilai kerukunan dapat bergeser menjadi budaya menutup-nutupi kesalahan demi menjaga citra organisasi, sedangkan prinsip hormat dapat berubah menjadi kepatuhan tanpa kritik yang justru membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku etis maupun tidak etis dalam pengambilan keputusan bisnis (Wibowo, 2021; Dewi & Riyanto, 2021). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan budaya sebagai faktor pendukung tata kelola perusahaan, bukan sebagai perspektif utama dalam menjelaskan akar moral terjadinya fraud. Oleh karena itu, Etika Jawa memberikan sudut pandang yang berbeda karena tidak hanya menjelaskan perilaku organisasi dari sisi normatif, tetapi juga mengungkap bagaimana nilai budaya dapat mengalami distorsi sehingga melegitimasi tindakan yang

bertentangan dengan prinsip etika.

Fraud Hexagon Theory

Fraud Hexagon Theory menjelaskan bahwa praktik fraud dipengaruhi oleh enam faktor utama, yaitu pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogance, dan collusion (Vousinas, 2019). Dibandingkan model sebelumnya, teori ini memberikan penjelasan yang lebih komprehensif karena memasukkan unsur kolusi sebagai faktor yang sering ditemukan dalam praktik corporate fraud berskala besar. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kombinasi keenam faktor tersebut mampu menjelaskan berbagai bentuk manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, maupun korupsi korporasi secara lebih baik dibandingkan Fraud Triangle maupun Fraud Diamond (Meilany & Winario, 2024; Sadda & Januarti, 2023).

Meskipun demikian, Fraud Hexagon Theory lebih banyak menjelaskan mekanisme terjadinya kecurangan, sementara aspek moral yang mendasari keputusan pelaku belum memperoleh perhatian yang memadai. Dengan demikian, teori ini perlu dipadukan dengan perspektif etika agar analisis tidak berhenti pada identifikasi faktor penyebab fraud, tetapi juga mampu menjelaskan bagaimana proses pembenaran moral (moral rationalization) berkembang dalam lingkungan organisasi.

Corporate Governance sebagai Mekanisme Pengendalian

Corporate governance merupakan seperangkat mekanisme yang dirancang untuk memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut diyakini mampu memperkuat sistem pengendalian internal serta mengurangi peluang terjadinya penyimpangan organisasi (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021). Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola perusahaan berhubungan erat dengan kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, dan komitmen etika para pengambil keputusan (Moridu, 2023; Fujikawa & Yamamoto, 2021).

Namun demikian, berbagai kasus korporasi menunjukkan bahwa tata kelola yang secara formal telah memenuhi regulasi belum tentu mampu mencegah fraud apabila tidak diikuti oleh integritas moral para pemimpin organisasi. Dengan kata lain, kegagalan tata kelola sering kali bukan hanya disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan, melainkan juga oleh penyimpangan nilai etika yang berkembang dalam budaya organisasi.

Sintesis Penelitian Terdahulu dan Kerangka Konseptual

Kajian terdahulu secara umum menunjukkan bahwa penelitian mengenai kebangkrutan perusahaan masih didominasi oleh pendekatan finansial, hukum, maupun tata kelola perusahaan (Mayasari & Sesung, 2025; Putri & Subagyo, 2024). Di sisi lain, penelitian mengenai fraud lebih banyak menggunakan Fraud Hexagon Theory untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kecurangan (Capraş & Achim, 2024; Meilany & Winario, 2024). Penelitian mengenai Etika Jawa juga umumnya difokuskan pada kepemimpinan atau pendidikan karakter (Roring & Tondok, 2025), sehingga penerapannya dalam menjelaskan praktik corporate fraud masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan penelitian dengan mengintegrasikan perspektif etika lokal ke dalam kajian tata kelola perusahaan.

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini menempatkan Etika Jawa Franz Magnis-Suseno sebagai landasan utama analisis, sedangkan Fraud Hexagon Theory digunakan untuk mengidentifikasi pola fraud, dan corporate governance digunakan sebagai kerangka evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan organisasi. Integrasi ketiga perspektif tersebut menghasilkan kerangka konseptual yang menjelaskan bahwa praktik fraud merupakan manifestasi dari interaksi antara lemahnya tata kelola perusahaan dan penyimpangan nilai-nilai etika yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kebangkrutan korporasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana fraud terjadi, tetapi juga mengapa tindakan tersebut dapat dipertahankan dalam organisasi melalui proses rasionalisasi yang dipengaruhi oleh budaya dan kepemimpinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dalam perspektif Etika Jawa Franz Magnis-Suseno. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan suatu fenomena secara kontekstual melalui interpretasi terhadap berbagai sumber informasi yang saling melengkapi (Yin, 2023). Unit analisis penelitian adalah praktik fraud, penyimpangan tata kelola perusahaan, dan pengambilan keputusan organisasi yang berkaitan dengan proses kepailitan Sritex. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari putusan pengadilan, laporan keuangan, laporan resmi pemerintah, publikasi lembaga terkait, artikel ilmiah, serta

pemberitaan media yang memiliki kredibilitas dan relevansi dengan fokus penelitian. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan otoritas penerbit, keterkaitan dengan permasalahan penelitian, serta konsistensi informasi antarsumber sehingga data yang dianalisis memiliki tingkat keandalan yang memadai (Tracy, 2020).

Analisis data dilakukan secara interaktif mengacu pada tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2020). Pada tahap kondensasi, peneliti melakukan open coding untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait praktik fraud, prinsip Etika Jawa, dan penerapan corporate governance, kemudian dilanjutkan dengan axial coding untuk menghubungkan antar tema, serta selective coding guna menyusun interpretasi yang menjelaskan hubungan antar konsep sesuai tujuan penelitian (Saldaña, 2021). Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang berasal dari dokumen hukum, laporan resmi, publikasi ilmiah, dan media kredibel. Selain itu, bias interpretasi diminimalkan melalui proses perbandingan antar sumber (cross-check), penggunaan kerangka teori secara konsisten, serta evaluasi kritis terhadap kesesuaian temuan dengan bukti empiris sehingga interpretasi yang dihasilkan tetap terjaga kredibilitas dan objektivitasnya (Creswell & Poth, 2024).

HASIL PENELITIAN

Analisis Praktik Fraud pada Kasus Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex)

Penelitian ini menemukan bahwa proses kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan finansial, tetapi juga menunjukkan adanya pola penyimpangan tata kelola perusahaan yang berlangsung secara bertahap. Berdasarkan telaah terhadap putusan pengadilan, laporan keuangan, dokumen resmi pemerintah, serta berbagai publikasi yang kredibel, ditemukan indikasi bahwa persoalan likuiditas perusahaan berkembang bersamaan dengan meningkatnya beban utang, menurunnya kemampuan memenuhi kewajiban kepada kreditur, serta lemahnya mekanisme pengendalian internal dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor finansial dan tata kelola perusahaan saling berkaitan dalam membentuk proses yang berujung pada kepailitan perusahaan.

Hasil penelusuran dokumen juga menunjukkan adanya dugaan praktik manipulasi laporan keuangan, penggunaan fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, serta pengambilan keputusan strategis yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sejumlah informasi yang berasal dari laporan resmi dan proses penegakan hukum memperlihatkan bahwa keputusan korporasi lebih banyak diarahkan untuk mempertahankan keberlangsungan operasional jangka pendek daripada memperbaiki kondisi fundamental perusahaan. Situasi tersebut mengakibatkan meningkatnya eksposur risiko keuangan sekaligus menurunkan kepercayaan para kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan proses open coding terhadap berbagai sumber data, penelitian ini mengidentifikasi enam kategori temuan yang selaras dengan dimensi dalam Fraud Hexagon Theory, yaitu pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogance, dan collusion. Keenam kategori tersebut tidak muncul sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dalam membentuk pola penyimpangan yang berlangsung secara berkelanjutan selama perusahaan menghadapi tekanan ekonomi. Hasil identifikasi tersebut dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Identifikasi Praktik Fraud pada Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk

Dimensi Fraud Hexagon	Temuan Empiris
Pressure	Tekanan likuiditas, peningkatan utang, penurunan pendapatan, dan kewajiban pembayaran kepada kreditur.
Opportunity	Lemahnya pengawasan internal dan tidak optimalnya fungsi pengendalian dalam proses pemberian kredit maupun pengambilan keputusan strategis.
Rationalization	Terdapat indikasi pembenaran terhadap berbagai keputusan yang dianggap diperlukan untuk mempertahankan operasional perusahaan di tengah tekanan bisnis.
Capability	Pengambilan keputusan strategis dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan tinggi sehingga mampu memengaruhi kebijakan korporasi.
Arrogance	Dominasi pengambilan keputusan pada tingkat manajemen puncak mengurangi efektivitas mekanisme pengawasan organisasi.
Collusion	Adanya dugaan kerja sama antara beberapa pihak dalam proses pembiayaan dan pengambilan keputusan yang kemudian menjadi bagian dari proses penyelidikan hukum.

Sumber : Hasil Penelitian, 2026

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dimensi pressure menjadi faktor yang paling awal teridentifikasi. Penurunan kinerja keuangan setelah pandemi COVID-19

menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban kepada kreditur, sementara kebutuhan pembiayaan operasional terus meningkat. Dalam kondisi tersebut perusahaan tetap memperoleh fasilitas pembiayaan dalam jumlah besar meskipun kondisi keuangannya terus mengalami penurunan. Situasi ini memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi menjadi pemicu munculnya berbagai keputusan yang meningkatkan risiko organisasi.

Selain tekanan finansial, penelitian juga menemukan bahwa peluang (opportunity) muncul akibat belum optimalnya fungsi pengawasan internal dan eksternal. Beberapa keputusan strategis yang berkaitan dengan pembiayaan perusahaan tidak sepenuhnya diimbangi dengan proses evaluasi risiko yang memadai. Di sisi lain, mekanisme pengawasan yang seharusnya berfungsi sebagai pengendali tidak mampu mendeteksi secara dini berbagai penyimpangan yang berkembang selama periode tersebut.

Hasil analisis selanjutnya memperlihatkan adanya indikasi rationalization, yaitu munculnya pembenaran terhadap kebijakan perusahaan yang dipandang sebagai langkah untuk menjaga kelangsungan usaha. Dalam berbagai dokumen yang dianalisis, keputusan-keputusan tersebut lebih banyak diarahkan untuk mempertahankan citra perusahaan di hadapan kreditur maupun mitra usaha daripada melakukan perbaikan terhadap kondisi fundamental perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa rasionalisasi menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan yang berisiko tinggi.

Pada dimensi capability, penelitian menemukan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh kelompok manajemen tertentu memberikan kemampuan untuk menentukan berbagai kebijakan strategis perusahaan. Kemampuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penguasaan informasi, tetapi juga mencakup akses terhadap sumber daya organisasi yang memungkinkan berbagai keputusan dapat dijalankan secara efektif meskipun mengandung risiko yang tinggi.

Sementara itu, dimensi arrogance tercermin dari kuatnya dominasi pengambilan keputusan pada tingkat pimpinan perusahaan yang mengurangi efektivitas mekanisme pengawasan. Konsentrasi kewenangan tersebut menyebabkan fungsi kontrol organisasi menjadi kurang optimal sehingga berbagai keputusan strategis tidak memperoleh pengujian secara independen. Bersamaan dengan itu, penelitian juga menemukan adanya indikasi collusion yang tercermin dari dugaan keterlibatan beberapa pihak dalam proses pembiayaan dan pemberian fasilitas kredit. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik

penyimpangan tidak hanya melibatkan individu tertentu, tetapi berkembang melalui interaksi berbagai aktor yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan perusahaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi tekanan ekonomi, kelemahan pengawasan, dominasi pengambilan keputusan, rasionalisasi kebijakan, kapasitas aktor yang terlibat, serta indikasi kolusi. Temuan empiris tersebut menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana penyimpangan tersebut dipahami melalui perspektif Etika Jawa Franz Magnis-Suseno pada bagian pembahasan berikutnya.

Pembahasan

Praktik Fraud sebagai Manifestasi Kegagalan Tata Kelola Perusahaan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk tidak dapat dipahami hanya sebagai konsekuensi penurunan kinerja keuangan, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai kelemahan tata kelola perusahaan yang berlangsung secara sistematis. Indikasi tekanan finansial, lemahnya pengawasan, dominasi pengambilan keputusan, hingga dugaan kolusi memperlihatkan bahwa mekanisme pengendalian perusahaan tidak berfungsi secara optimal. Kondisi tersebut memperkuat pandangan bahwa efektivitas corporate governance tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur organisasi, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam setiap keputusan bisnis (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Devi (2024) yang menyatakan bahwa kelemahan tata kelola perusahaan meningkatkan peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan karena fungsi pengawasan tidak berjalan secara efektif. Fujikawa dan Yamamoto (2021) juga menjelaskan bahwa corporate fraud umumnya berkembang ketika mekanisme kontrol formal gagal mengidentifikasi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan strategis. Dengan demikian, kasus Sritex menunjukkan bahwa keberadaan perangkat tata kelola belum cukup untuk mencegah penyimpangan apabila implementasinya tidak didukung oleh integritas pengambil keputusan.

Di sisi lain, hasil penelitian ini memperluas temuan Putri dan Subagyo (2024) yang menitikberatkan penyebab kesulitan keuangan Sritex pada indikator financial distress.

Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan finansial merupakan konsekuensi yang berkembang bersamaan dengan lemahnya pengendalian organisasi. Artinya, kondisi keuangan yang memburuk bukan satu-satunya penyebab kepailitan, tetapi menjadi bagian dari rangkaian persoalan tata kelola yang memperbesar risiko organisasi secara berkelanjutan.

Fraud Hexagon Theory dalam Menjelaskan Pola Penyimpangan

Enam dimensi dalam Fraud Hexagon Theory ditemukan saling berhubungan dan membentuk pola penyimpangan yang tidak berdiri sendiri. Tekanan finansial menjadi faktor awal yang mendorong organisasi mencari berbagai alternatif pembiayaan, sementara lemahnya pengawasan menciptakan peluang terjadinya penyimpangan. Rasionalisasi terhadap keputusan berisiko, didukung oleh kemampuan aktor yang memiliki kewenangan, kemudian diperkuat oleh dominasi kepemimpinan dan dugaan kolusi antarpihak. Pola tersebut menunjukkan bahwa praktik fraud berkembang sebagai proses yang bersifat sistemik, bukan sebagai tindakan individual yang terpisah.

Temuan ini mendukung penelitian Meilany dan Winario (2024) serta Sadda dan Januarti (2023) yang menyatakan bahwa Fraud Hexagon Theory memiliki kemampuan yang lebih komprehensif dibandingkan model sebelumnya karena memasukkan unsur kolusi sebagai bagian penting dalam menjelaskan kecurangan organisasi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa teori tersebut lebih efektif menjelaskan bagaimana penyimpangan terjadi dibandingkan mengapa pelaku mempertahankan keputusan yang menyimpang. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan mekanisme terjadinya fraud, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan dimensi moral yang mendasari tindakan tersebut.

Hasil penelitian ini berbeda dengan beberapa studi yang lebih menekankan tekanan ekonomi sebagai faktor dominan dalam praktik fraud. Pada kasus Sritex, tekanan ekonomi memang menjadi pemicu awal, tetapi praktik penyimpangan berkembang karena adanya interaksi antara peluang, pembenaran tindakan, konsentrasi kewenangan, dan kolusi. Oleh karena itu, penyebab kepailitan tidak dapat direduksi hanya pada satu dimensi, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor organisasi yang saling memperkuat.

Perspektif Etika Jawa Franz Magnis-Suseno terhadap Kasus Sritex

Perspektif Etika Jawa Franz Magnis-Suseno memberikan penjelasan yang lebih

mendalam terhadap temuan empiris penelitian ini. Prinsip kerukunan pada dasarnya bertujuan menjaga harmoni sosial melalui hubungan yang saling menghargai dan menghindari konflik yang tidak perlu. Namun, dalam konteks organisasi, nilai tersebut dapat mengalami distorsi apabila dimaknai sebagai kewajiban mempertahankan citra perusahaan dengan mengabaikan keterbukaan terhadap masalah yang sebenarnya terjadi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan-keputusan strategis lebih diarahkan untuk menjaga keberlangsungan organisasi dalam jangka pendek dibandingkan melakukan evaluasi terhadap kondisi riil perusahaan.

Demikian pula prinsip hormat, yang semestinya menjadi dasar penghargaan terhadap tanggung jawab dan kedudukan setiap individu, berpotensi berubah menjadi kepatuhan tanpa sikap kritis ketika kekuasaan terpusat pada kelompok tertentu. Kondisi tersebut mengurangi efektivitas mekanisme pengawasan karena proses pengambilan keputusan tidak lagi memperoleh ruang koreksi yang memadai. Akibatnya, berbagai kebijakan yang berisiko tinggi dapat dijalankan tanpa adanya pengujian secara independen.

Temuan ini memperkuat argumentasi Roring dan Tondok (2025) bahwa nilai budaya memiliki pengaruh terhadap perilaku organisasi, tetapi hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai budaya bersifat dinamis dan dapat dimanfaatkan secara keliru untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan prinsip etika. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa kegagalan organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengendalian, tetapi juga oleh penyimpangan terhadap nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat dari tekanan finansial atau kelemahan tata kelola perusahaan, melainkan sebagai konsekuensi dari terjadinya penyimpangan nilai etika dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Integrasi Perspektif Etika Jawa Franz Magnis-Suseno dengan Fraud Hexagon Theory dan prinsip corporate governance memperlihatkan bahwa praktik fraud berkembang ketika nilai kerukunan dan hormat mengalami distorsi menjadi budaya yang menoleransi penyimpangan, menghindari keterbukaan, serta mengurangi fungsi pengawasan yang kritis. Temuan ini memperluas

kajian mengenai kebangkrutan korporasi dengan menunjukkan bahwa dimensi etika dan budaya organisasi memiliki peran penting dalam menjelaskan mengapa mekanisme pengendalian formal tidak selalu mampu mencegah terjadinya fraud.

Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola perusahaan perlu diiringi dengan internalisasi nilai etika dalam kepemimpinan, budaya organisasi, dan proses pengambilan keputusan sehingga mekanisme pengawasan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada integritas moral. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pengembangan kajian etika bisnis berbasis kearifan lokal melalui pemanfaatan Perspektif Etika Jawa sebagai kerangka analisis terhadap corporate fraud dan kebangkrutan perusahaan. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi masukan bagi regulator, komisaris, direksi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun sistem tata kelola yang lebih adaptif terhadap risiko penyimpangan etika. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris pada berbagai sektor industri serta mengombinasikan perspektif budaya lokal dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara etika, tata kelola perusahaan, dan keberlanjutan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

ACFE Indonesia Chapter. (2025). *Survei Fraud Indonesia 2025*. ACFE Indonesia Chapter.

Capraș, I. L., & Achim, M. V. (2024). Analysis and classification of corporate fraud based on the literature and investigated cases in Romania. *Studies in Business and Economics, 19*(2), 155-175.

Christian, N., Tryany, J., & Liang, V. L. (2024). Analisis Motivasi Fraud dengan Pendekatan Teori Fraud. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi), 16*(1), 77-95.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Daryono. (2021). *Filsafat etika masyarakat Islam Jawa: Konsep baik dan buruk*. Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy, 2(1), 59-82.

Devi, P. V. S. (2024). Corporate governance as a detector of financial statement fraud: Systematic literature review. *Asia Pacific Fraud Journal, 9*(1), 37-47.

Dewi, D. I., & Riyanto, S. (2021). Business ethics in the framework of corporate governance: A literacy study. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2*(8), 1301-1309.

Fujikawa, N., & Yamamoto, S. (2021). *How does organizational fraud occur?* Journal of Information and Management, 41(4), 45-66.

Komite Nasional Kebijakan Governansi. (2021). *Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021*. KNKG.

Mayasari, V. F., & Sesung, R. (2025). Analisis Kepailitan PT Sritex Berdasarkan Faktor Penyebab Dampak dan Mitigasi Hukum. *Journal Evidence Of Law*, *4*(2), 689-698.

Meilany, M., & Winario, M. (2024). *Motives for fraudulent behavior in Islamic bank: Hexagon model of perspective fraud*. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 5(1), 55-69.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Moridu, I. (2023). The role of corporate governance in managing financial risk: A qualitative study on listed companies. *The ES Accounting and Finance*, *1*(3), 176-183.

Putri, R. A., & Subagyo, H. (2024). *Analisis financial distress pada PT Sri Rejeki Isman Tbk periode 2019-2023*. SEIKO: Journal of Management & Business, 7(2), 1285-1300.

Ristiyanti, J. (2025, July 22). *Kerugian negara di kasus pemberian kredit Sritex capai Rp1,08 triliun*. Tempo.

Roring, T. A., & Tondok, M. S. (2025). *Implementasi etika Jawa dalam praktik kepemimpinan sekolah*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 10(1), 89-115.

Sadda, Y., & Januarti, I. (2023). Model Vousinas Dan Kecurangan Laporan Keuangan: Bukti Dari Perusahaan Perbankan Di Indonesia. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, *6*(2), 355-374.

Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE Publications.

Tamaela, F. A. F., Zamzam, I., Hormati, A., & Zainuddin, Z. (2025). Fraud pentagon theory dan deteksi kecurangan laporan keuangan: Pendekatan Beneish M-Score pada sektor perdagangan. *Owner*, *9*(2), 1548-1564.

Tracy, S. J. (2020). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the SCORE model. *Journal of Financial Crime*, *26*(1), 372-381.

Yin, R. K. (2023). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). SAGE Publications.